

KESEJAHTERAAN SOSIAL di PERBATASAN ANTAR NEGARA

Achmadi Jayaputra, dkk.



Kesejahteraan Sosial di Perbatasan Antar Negara

Penulis :

Achmadi Jayaputra (Kementerian Sosial)
Setyo Sumarno (Kementerian Sosial)
Harapan Lumban Gaol (Kementerian Sosial)
Nurasih Shamadiyah (Universitas Malikussaleh)
Mari Esterilita (Universitas Binawan)
Utomo Hanafi Rohman (Universitas Binawan)
Rizki Nurrahman (Universitas Muhammadiyah Jakarta)

Penerbit



Achmadi Jayaputra, dkk.

Kesejahteraan Sosial di Perbatasan Antar Negara. Jakarta; UMJ Press, 2020.
vi + 134 hlm. 14,8 cm x 21 cm.

Editor:

Achmadi Jayaputra (Kementerian Sosial RI)

Penulis:

1. Achmadi Jayaputra (Kementerian Sosial)
2. Setyo Sumarno (Kementerian Sosial)
3. Harapan Lumban Gaol (Kementerian Sosial)
4. Nurasih Shamadiyah (Universitas Malikussaleh)
5. Mari Esterilita (Universitas Binawan)
6. Utomo Hanafi Rohman (Universitas Binawan)
7. Rizki Nurrahman (Universitas Muhammadiyah Jakarta)

Cetakan Pertama, 2020

ISBN 987-602-0798-25-5

Diterbitkan oleh:

UMJ Press

Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Cireundeu, Kec. Ciputat Timur,
Kota Tangerang Selatan, Banten 15419

PENGANTAR PENERBIT

Assalamualaikum warrahmatullahi wa barakatuh

Segala puji kehadiran Allah SWT dengan terbitnya buku ini yang telah disusun para akademisi dan peneliti terkait dengan aspek kesejahteraan sosial. Kami selalu menyambut baik tulisan yang sifatnya praktis dalam upaya mewujudkan kesejahteraan golongan masyarakat tertentu. Terutama mereka yang dianggap kurang beruntung dan selalu diupayakan untuk bersama menikmati kehidupan ini sesuai dengan kesempatan yang ada.

Melalui tulisan ini diharapkan pembaca dan halayak sekalian dapat mengetahui dan memahami hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapainya. Terutama wilayah perbatasan antar negara yang harus menjadi perhatian dalam pengembangan masyarakatnya sebab masih kurang perhatian terhadap wilayah tersebut. Hanya daerah tertentu yang sudah mengalami kemajuan dan ketergantungan, sehingga diharapkan masyarakat kita dapat sejajar dengan masyarakat lainnya.

Semoga bermanfaat.

Wassalamualaikum warrahmatullahi wa barakatuh

Jakarta, 1 Maret 2020
Ditaktur UMJ Press

Endang Zakaria

DAFTAR ISI

Pengantar Penerbit	iii
Pengantar Editor	iv
Daftar Isi	vi
Bab 1 Prolog. Situasi di Perbatasan Antar Negara	
Oleh: Achmadi Jayaputra – Kementerian Sosial	1
A. Kawasan Perbatasan	1
B. Permasalahan	6
C. Aspek Sosial dan Budaya	10
Daftar Bacaan	16
Bab 2 Kebijakan Kementerian Sosial Terhadap Warga Perbatasan Antar Negara	
Oleh: Setyo Sumarno – Kementerian Sosial	17
A. Kemiskinan	17
B. Kebijakan	19
C. Program dan Kegiatan	24
D. Hasil Penanganan	34
Daftar Bacaan	46
Bab 3 Membuka Akses Bagi Komunitas Adat Terpencil	
Oleh: Harapan Lumban Gaol – Kementerian Sosial	49
A. Komunitas dan Aksesibilitas	50
B. Pemberdayaan dan Pendampingan	53
C. Tantangan	56
D. Parameter Keberhasilan	62
Daftar Bacaan	63
Bab 4 Pusat Pemberdayaan Keluarga di Perbatasan	
Oleh: Rizki Nurrahman – Universitas Muhammadiyah Jakarta	65
A. Wujud Kedaulatan	65

	B. Peningkatan Kesejahteraan	69
	Daftar Bacaan	73
Bab 5	Kesejahteraan Sosial di Sumatera	
	Oleh: Nurasih Shamadiyah - Universitas Malikussaleh	74
	A. Sumatera Sekitarnya	74
	B. Budaya	78
	C. Kesejahteraan Sosial	83
	Daftar Bacaan	91
Bab 6	Kesejahteraan Sosial di Kalimantan	
	Oleh: Mari Esterilita - Universitas Binawan	93
	A. Profil Daerah	93
	B. Perbedaan Sosial dan Budaya	95
	C. Ketergantungan Ekonomi	98
	D. Kesejahteraan Sosial	104
	Daftar Bacaan	110
Bab 7	Profil Wilayah Indonesia Timur	
	Oleh: Utomo Hanafi Rohman - Universitas Binawan	112
	A. Nusa Tenggara Timur	112
	B. Maluku	118
	C. Papua	134
	Daftar Bacaan	137
Bab 8	Epilog. Potensi dan Masalah di Perbatasan Antar Negara	
	Oleh: Achmadi Jayaputra - Kementerian Sosial	138
	A. Potensi	139
	B. Permasalahan	141
	Biodata Penulis	146

Bab 6

KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KALIMANTAN

Oleh: Mari Esterilita – Universitas Binawan

Pulau Kalimantan sebutan awalnya borneo. Perubahan nama pulau tersebut terkait dengan perjanjian pembagian wilayah antara Inggris dengan Belanda yang membelah kedua pulau tersebut. Tiga negara berada di pulau tersebut yaitu; Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Bagian tengah pulau ini sebagian besar merupakan wilayah Indonesia mencakup tiga provinsi yaitu; Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Bagian utara sebagian merupakan bagian Wilayah Malaysia Timur dengan dua Negara Bagian yaitu; Sarawak dan Sabah. Selain itu negara Brunei Darussalam dengan satu negara bagian.

A. Profil Daerah

Provinsi Kalimantan Barat. Provinsi Kalimantan Barat, wilayah ini dilalui garis khatulistiwa atau garis lintang 0° tepatnya berada di atas Kota Pontianak. Batas wilayah provinsi; sebelah utara dengan Sarawak, Malaysia; sebelah selatan dengan Laut Jawa dan Provinsi Kalimantan Tengah, sebelah timur dengan Provinsi Kalimantan Timur, sebelah barat dengan Laut Natuna dan Selat Karimata.

Secara administratif Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari dua kota dan 12 kabupaten. Dua kota yaitu; Pontianak dan

Singkawang. Kabupaten yaitu; Bengkayang, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang, Kubu Raya, Landak, Melawi, Pontianak, Sambas, Sanggau, Sekadau, dan Sintang. Luas wilayahnya sekitar 146.807 Km² atau 7,53 % dari luas Indonesia atau 1,13 kali luas Pulau Jawa. Provinsi ini terbesar keempat di Indonesia. Topografi Kalimantan Barat merupakan dataran rendah mempunyai ratusan sungai yang aman bila dilayari, sedikit berbukit, dan sebagai daerah berawarawa bercampur gambut dan hutan mangrove, bergunung relatif rendah dan non aktif. Daerah Kalimantan Barat memiliki ratusan sungai besar dan kecil, sehingga sering dijuluki Provinsi Seribu Sungai. Sungai Kapuas merupakan sungai terpanjang mengalir air dari berbagai anak sungai di pedalaman dan bermuara ke Selat Karimata. Daerah Kalimantan Barat ini sebagian memiliki perairan laut yang memiliki pulau besar dan kecil yang sebagian tidak berpenghuni. Sebagian kepulauan terutama wilayah di wilayah Kabupaten Ketapang merupakan Taman Nasional serta wilayah perlindungan atau konservasi.

Provinsi Kalimantan Timur. Kalimantan Timur memiliki luas wilayah daratan yaitu 127.267,52 Km² dan luas pengelolaan laut 25.656 Km². Batas wilayahnya; sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Utara; sebelah timur berbatasan dengan Selat Makasar dan Laut Sulawesi; sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan; sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Barat, serta Negara Bagian Serawak. Secara administratif terdiri dari tiga kota dan enam kabupaten. Tiga kota yaitu: Samarinda, Balikpapan, dan Bontang. Enam kabupaten yaitu: Berau, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Paser, dan Penajam Paser Utara.

Topografi provinsi ini bergelombang dari kemiringan landai sampai curam, dengan ketinggian berkisar antara 0 - 1.500 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan antara 0 - 60 persen. Daerah dataran rendah pada umumnya dijumpai pada kawasan sepanjang sungai. Sedangkan daerah perbukitan dan pegunungan

memiliki ketinggian rata-rata lebih dari 1.000 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan 300 % terdapat dibagian barat laut yang berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia. Kondisi topografi tersebut sangat berpengaruh terhadap peluang budi daya suatu jenis komoditi, potensi dan persediaan air, dinamika hidrologi dan kerentanan terhadap erosi.

Provinsi Kalimantan Utara. Provinsi Kalimantan Utara luasnya $\pm 75.467.70 \text{ Km}^2$, berdasarkan batas kewenangan provinsi diketahui memiliki lautan seluas 11.579 Km^2 (13 %) dari luas wilayahnya. Batas Wilayah Kalimantan Utara yakni; sebelah utara berbatasan dengan Negara Bagian Sabah; sebelah timur berbatasan dengan Laut Sulawesi, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur, dan sebelah barat berbatasan dengan Negara Bagian Serawak. Secara administratif terdiri dari satu kota yaitu; Tarakan. Selain itu terdiri dari empat kabupaten yaitu: Bulungan, Malinau, Nunukan, dan Tana Tidung.

B. Perbedaan Sosial dan Budaya

Melayu dan Dayak. Di Pulau Kalimantan terdapat dua suku yaitu; Melayu dan Dayak. Suku Melayu mendiami daerah pantai dan hulu sungai besar. Keberadaan suku tersebut terkait dengan sejarah kedatangan mereka yang menyebut ada berasal dari Sumatera dan Malaya (Malaysia). Keturunannya sering disebut orang Pontianak, orang Banjar, dan orang Samarinda. Ada juga yang menyebut suku Melayu merupakan penduduk asli yang menempati muara sungai dan melakukan perdagangan sampai ke pedalaman atau hulu sungai besar. Kedua suku tersebut masing-masing memiliki unsur kebudayaan berbeda. Sedangkan suku Dayak, umumnya beranggapan sebagai penduduk asli Pulau Kalimantan yang mendiami bagian hulu sungai-sungai besar. Empat sungai besar sebagai jalur atau perhubungan yaitu; Kapuas bermuara ke Selat Karimata, Mahakam bermuara ke Selat Makassar, Barito dan Kahayan bermuara ke Laut Jawa. Mereka bertemu dengan suku

Melayu, sehingga terjadi perjumpaan antar suku di pedalaman dan di muara sungai.

Berdasarkan sumber tertentu, asal suku Dayak terdiri dari enam atau tujuh suku besar dan terbagi dalam 40 sub-sub suku. Suku besar atau suku inti yaitu; Bahau, Bukit, Kenyah, Maanyan, Ngaju, dan Punan. Suku Dayak sering melakukan perpindahan atau migrasi yang dipengaruhi mata pencaharian hidup sebagai peladang berpindah. Misalnya suku Dayak Kenyah di pedalaman Kalimantan Timur sampai ke Negara Bagian Serawak. Suku Dayak Kenyah ada yang sudah sampai ke Negara Bagian Sabah (J.U.Lontaan, 1974; Achmadi Jayaputra; 2012: 131, 135 - 136). Masing-masing sub suku Dayak mempunyai adat istiadat dan budaya yang mirip, sesuai dengan sosial kemasyarakatannya, adat istiadat, budaya, maupun bahasa yang khas pada masing-masing sub suku tersebut, baik Dayak di Indonesia maupun Dayak di Sabah dan Sarawak Malaysia. Mereka menyebar di seluruh daerah pedalaman Kalimantan. Mereka menyebut dirinya dengan kelompok yang berasal dari suatu daerah berdasarkan nama sungai, nama pahlawan, nama alam dan sebagainya. Misalnya suku Iban dalam bahasa Kayan berasal kata *ivan* (Indonesia; pengembara).

Bentuk Permukiman. Pemukiman seperti yang dipahami oleh sebagian besar masyarakat sebagai tempat tinggal, berteduh, dan melakukan aktivitas sehari-hari. Pemukiman meliputi tiga hal, pertama, supra struktur yaitu berbagai komponen fisik tempat manusia mengaub (*shelter*). Kedua, infra struktur yaitu prasarana bagi gerak manusia perhubungan dan komunikasi, sirkulasi tenaga dan materi untuk kebutuhan jasmaninya. Ketiga, pelayanan (*service*) yaitu segala hal yang mencakup pendidikan, kesehatan, gizi, rekreasi dan kebudayaan (Suprapti, 1980: 1).

Umumnya kampung atau desa berada di aliran sungai. Satu desa hanya terdiri dari beberapa rumah panjang (*lamin, betang, umaq*) yang didirikan sejajar dan menghadap aliran sungai. Tiap rumah panjang terdiri dari dua bagian yaitu; pertama, beranda

(*usei*) merupakan ruang terbuka bagian depan sepanjang bangunan. Kedua, bilik (*amin*) yang merupakan ruang terbuka untuk satu keluarga luas. Bilik masih terbagi empat bagian yaitu; tempat menerima tamu (*pamen*), tungku (*atang*), tempat tidur (*tilung*), dan tempat menyimpan barang-barang berharga (*sinong*). Di belakang bilik ada pintu ke dapur (*paawang*), kandang ayam (*buaniyap*) dan kandang babi (*liwang buin*) (Achmadi Jayaputra; 2012: 132).

Sungai bagi orang Dayak merupakan bagian dari kehidupan yang tak terpisahkan. Sungai selain sebagai tempat melakukan aktivitas keseharian mulai dari mencuci, mandi, sarana transportasi juga dimanfaatkan untuk membangun rumah atau pemukiman. Suku dayak membangun rumah mereka dipinggir sungai atau tidak jauh dari sungai. Menurut pandangan orang Banjar, rumah yang ideal adalah rumah yang bagian belakang menghadap sungai dan bagian depan menghadap jalan (Suryadikara, 2000: 12-13). Pemukiman ini khususnya didirikan di tebing-tebing sungai yang relatif tinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya yang umumnya berupa rawa-rawa (Daud, 1997: 106).

Sosial Budaya. Sistem kekerabatan suku dayak yaitu bilateral/ambilinial, yaitu menarik garis keturunan dari pihak ayah dan ibu. Sehingga system pewarisan tidak membedakan anak laki-laki dan anak perempuan.

Bentuk Kehidupan Keluarga:

1. Keluarga batih (*nuclear family*), wali/asbah mewakili keluarga dalam kegiatan sosial dan politik di lingkungan dandi luar keluarga adalah anak laki-laki tertua,
2. Keluarga luas (*extended family*), wali/asbah adalah saudara laki-laki ibu dan saudara laki-laki ayah. Peran wali/asbah misalnya dalam hal pernikahan, orang yang paling sibuk mengurus masalah pernikahan sejak awal sampai akhir acara. Oleh karena itu, semua permasalahan dan keputusan keluarga harus dikonsultasikan dengan wali/asbah. Penunjukan wali/

asbab berdasarkan kesepakatan keluarga.

Suku Dayak juga dikenal dengan sistem pelapisan social dimana pelapisan terbagi menjadi dua yakni lapisan atas dan lapisan bawah. Lapisan atas berdasarkan keturunan awal dan terdahulu dna pertama membuka sebuah perkampungan. Sedangkan, Lapisan bawah adalah nama biasa. Kelompok kekerabatan yang terpenting yaitu keluarga luas utrolokal. Rumah tangga ini berlaku sebagai satu kesatuan fisik karena mereka tinggal dalam satu rumah panjang, prinsip keturunann suku Dayak menghitung sebagian hubungan kekerabatan laki-laki dan perempuan (*ambilineal*).

Suku Dayak memiliki beberapa adat istiadat yang masih terpelihara sebagai perwujudan dunia supranatural yang masih kuat hingga saat ini. Upacara *Tiwah* merupakan upacara adat yang sering dilakukan dengan cara pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke *sandung* yang sudah dibuat. *Sandung* merupakan tempat yang berbentuk rumah kecil yang digunakan khusus untuk mereka yang sudah meninggal dunia. Upacara *Tiwah* bagi suku Dayak sangatlah sakral. Pada acara *Tiwah* ini sebelum tulang-tulang yang sudah meninggal tersebut diantar dan diletakkan ke tempatnya atau disanding banyak sekali acara-acara ritual, tarian, suara gong, dan hiburan lain. Sampai akhirnya tulang-tulang tersebut diletakkan di tempatnya. Masyarakat dayak memiliki tradisi berlandang berpindah, mereka mencari bagian hutan yang dianggap subur untuk bercocok tanam sebagai mata pencaharian mereka seterusnya.

C. Ketergantungan Ekonomi

Perekonomian Kalimantan Barat pada Triwulan IV 2018 tumbuh 5,07 %, meningkat dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya (4,97 %). Sisi permintaan, meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat pada Triwulan IV 2018 disebabkan oleh peningkatan kinerja yang terjadi pada komponen ekspor. Sisi penawaran, peningkatan terutama didorong kinerja

lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan, industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil, serta pertambangan dan penggalian.

Memasuki Triwulan I 2019, perekonomian diperkirakan akan melambat sebagai dampak dari antara lain melambatnya konsumsi rumah tangga pasca rangkaian kegiatan akhir tahun. Selain itu kinerja ekspor diperkirakan masih terbatas. Pada sisi penawaran, perlambatan kinerja diperkirakan akan terjadi di antaranya pada industri pengolahan didorong oleh prakiraan masih terbatasnya kinerja ekspor di awal 2019.

Inflasi Kalimantan Barat pada Triwulan IV 2018 tercatat sebesar 3,85 % atau meningkat dibandingkan Triwulan III 2018 yang sebesar 2,91 %. Meningkatnya tekanan harga pada kelompok barang transpor, komunikasi dan jasa keuangan mendorong inflasi pada Triwulan IV 2018. Berdasarkan komoditasnya, penurunan inflasi Triwulan IV 2018 terutama disebabkan kenaikan tarif angkutan udara, harga daging ayam ras, sotong, telur ayam ras dan bawang merah. Di sisi lain, deflasi pada komoditas bayam, jagung manis, ikan tongkol, nanas dan udang basah menahan laju inflasi lebih jauh pada Triwulan IV 2018.

Pada akhir Triwulan IV 2018, posisi DPK perbankan Kalimantan Barat tumbuh 6,55% dengan total nominal sebesar Rp 55,26 triliun, dibandingkan dengan posisi DPK pada akhir Triwulan III 2018 yang sebesar Rp 54,62 triliun. Posisi kredit berdasarkan lokasi di Kalimantan Barat pada akhir Triwulan IV 2018 tumbuh 9,81 % dengan posisi baki debit sebesar Rp 74,99 triliun. Kualitas kredit semakin membaik, tercermin dari menurunnya rasio NPL yaitu dari menjadi 1,80 % pada akhir Triwulan III 2018 menjadi 1,57 % pada akhir Triwulan IV 2018.

Perekonomian pada triwulan II 2019 diperkirakan tumbuh pada kisaran 5,0 % - 5,4 % seiring dengan pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Anggota Legislatif serta momen perayaan

gini Kalsel pada tahun 2017 sebesar 0,34. Adapun rasio gini Kalimantan Timur masih berada dibawah rasio gini nasional sebesar 0,39 pada tahun 2017. Rasio gini menunjukkan ketimpangan pendapatan yang terjadi di sebuah wilayah. Sebuah wilayah dikategorikan mengalami ketimpangan pendapatan ketika angka rasio gini mendekati 1. Sebaliknya semakin mendekati 0, maka perbedaan pendapatan antara golongan berpendapatan tertinggi dan terendah semakin kecil.

DAFTAR BACAAN

- Jayaputra, Achmadi, 2012. *Keragaman Suku Bangsa dan Pranata Sosial Masyarakat Indonesia*. Jakarta; UMJ Press.
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, 2013. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kalimantan Barat 2013 - 2018*. Pontianak; Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
- Winarno, Endro, dkk, 2016. *Potret Kesejahteraan di Tapal Batas*. Jogjakarta; B2P3KS.
- Mandasari, Asmara, 2016. "Kemiskinan di Kawasan Perbatasan Antar Negara" dalam *Kemiskinan. Telaah Konsep dan Penerapannya* (Rahmat Salam, ed), hal 280 - 296.
- Noveria, Mita, editor, 2017. *Kedaulatan Indonesia di Wilayah Perbatasan Perspektif Multidimensi*. Jakarta: LIPI - YOI.
- Purwanto, Agus Budi, 2012. *Obsesi Masyarakat Perbatasan Antar Negara dalam Keterisoliran. Masalah, Kebutuhan dan Sumber Daya di Long Midang, Krayan*. Jakarta; P3KS Press.
- Rudiatin, Endang, 2018. *MalayIndonesia. Integrasi Ekonomi di Perbatasan Indonesia-Malaysia: Sebatik Kalimantan Utara-Tawau Sabah*. Bekasi; Bening Eramedia.

- Wulandari, Triana, dkk, 2009a. *Sejarah Wilayah Perbatasan Entikong - Malaysia 1845 - 2009. Satu Ruang Dua Tuan*. Depok; Gramata.
- Wismayanti, Yanuar Farida, dan Ivo Noviana, 2011. *Pemenuhan Hak Anak di Wilayah Perbatasan. Studi Kasus di Entikong*. Jakarta; P3KS Press.

Negara Republik Indonesia dikenal dengan negara kepulauan. Wilayahnya yang terdiri dari daratan dan lautan berbatasan dengan beberapa negara memiliki dinamika sosial dan politik. Selama ini permasalahan politik lebih menonjol dalam kancah regional dan global, sehingga mempunyai pengaruh terhadap kedaulatan negara. Sebab dapat dikategorikan sebagai ancaman bagi negara dan bangsa, terutama berkaitan dengan batas-batas yang telah disepakati secara internasional atau dua negara dengan pengertian bersama. Kadang-kadang kasus kecil bisa membesar. Sebab terkait dengan kepentingan negara diantaranya politik dan hukum yang berlaku. Seperti masalah batas dengan patok batas, hubungan masyarakat dengan masyarakat negara tetangga, ekonomi dengan perdagangan lokalnya, dan permasalahan sosialnya.

Kementerian Sosial sejak tahun 2015 mulai memperhatikan masyarakat dan komunitas yang berada di perbatasan negara dengan program dan kegiatan tertentu. Khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat kita. Ternyata tidak semudah yang diharapkan karena banyak permasalahan kesejahteraan sosial yang memerlukan perhatian serius. Isi buku ini masih sederhana dengan data dan keterangan yang membahas tentang kesejahteraan sosial masyarakatnya dengan contoh yang digambarkan dalam bagian-bagiannya. Diakui sedikit yang terungkap karena banyak hal yang harus dipertimbangkan dalam upaya menjaga keutuhan isi tulisan. Oleh karena itu tulisan dalam buku ini merupakan awal dari kajian yang perlu dilakukan terhadap masyarakat kita yang berada di perbatasan negara.

ISBN 978-602-0798-54-7

